

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan suatu *trend* yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah yang melebihi perkembangan perbankan konvensional. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, perbankan syariah nasional tumbuh 12,24 persen pada September 2021. Dari sisi pendanaan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh 9,42 persen pada September 2021. (<https://republika.co.id/berita/r3ubns349/bsi-bank-syariah-tumbuh-positif-di-atas-konvensional>, diakses pada 30 Desember 2021).

Dengan semakin berkembangnya keberadaan Bank Umum Syariah di Indonesia, maka hal ini akan menuntut masing-masing bank untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja pada suatu bank dapat diukur dengan menggunakan salah satu rasio keuangan yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan (profit), baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasional. Profitabilitas salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank, selain faktor modal, kualitas aset, manajemen dan likuiditas.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Selain itu, rasio profitabilitas dapat menunjukkan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (laba) sehingga dapat berpengaruh pada pembuatan keputusan investasi maupun pendanaan bank. rasio profitabilitas bank adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan/laba pada periode tertentu. Rasio profitabilitas bank merupakan rasio yang utama dalam laporan keuangan, karena keuntungan/laba merupakan hasil akhir yang ingin dicapai setiap perusahaan perbankan.

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan assets maupun laba bagi modal sendiri, dengan demikian investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas in misalnya pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Agus Sartono, 2012:122). Bank yang memiliki profitabilitas tinggi, maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut memiliki kinerja yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh Prasetyo (2015) bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin baik kinerja perbankan atau perusahaan dan kelangsungan hidup perbankan atau perusahaan tersebut akan terjamin.

Idealnya perusahaan itu harus bisa memperoleh keuntungan di dalam perusahaan, namun karena efek Covid-19 beberapa perusahaan ada yang mengalami penurunan laba dan salah satunya adalah perbankan syariah. PT Bank

BTPN Syariah Tbk (BTPS) membukukan laba bersih sebesar Rp375,15 miliar pada kuartal pertama (*Q1*) 2021. Turun 6,75% secara *year-on-year* (*yoy*) atau dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu. Penurunan laba bersih tersebut seiring dengan kinerja pendapatan BTPS yang mengalami penurunan pada Q1 2021. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank tercatat sebanyak Rp1,11 triliun, turun 5,75% secara *yoy*. Kemudian pendapatan hak bagi hasil tercatat sebesar Rp1 triliun atau turun 4,29% secara *yoy*. dan pendapatan operasional lain sebesar Rp5,57 miliar. Pada akhir Maret 2021, total aset BTPS tercatat sebesar Rp17,3 triliun. (idfinancial.com)

Fenomena Selanjutnya masih pada perbankan syariah, BNI Syariah mencatat penurunan laba bersih sebesar 15,43% *year-on-year* (*yoy*) menjadi Rp266,64 miliar pada semester I 2020. Pada periode yang sama tahun 2019, laba bersih dari anak usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI ini sebesar Rp315,27 miliar. Dari sisi pembiayaan, BNI Syariah mencatat realisasi pembiayaan sebesar Rp31,33 triliun dengan komposisi pembiayaan segmen konsumen Rp15,87 triliun (51%), diikuti segmen komersial Rp7,59 triliun (24%), serta segmen kecil dan menengah Rp6 triliun (19%). Abdullah menyebutkan beberapa inisiatif bisnis yang telah dilakukan oleh perusahaan, antara lain bisnis digital, pengembangan bisnis remittance, penguatan bisnis *financial institution* (*FI*) dan *trade, roll out* bisnis mikro, dan implementasi *financing excellence program*. “Saat ini, BNI Syariah tetap fokus untuk memberikan yang terbaik bagi segenap nasabah dan *stakeholders* melalui produk syariah,” tuturnya. (www.trenasia.com)

Kasus selanjutnya, Kerugian negara yang muncul dalam kasus dugaan *money game* (permainan uang) di Bank NTB Syariah mencapai Rp 11,9 miliar. Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, mengatakan nominal kerugian muncul dalam hitungan satu tahun pada periode 2019-2020. "Munculnya kerugian ini saat pejabat (terlapor) dimutasi dari jabatannya," ujar dia di Mataram, Kamis (25/11). Terlapor dalam kasus ini berinisial PS. Dia dilaporkan sebagai terduga yang mengakibatkan kerugian negara. Ketika itu, PS masih menjabat sebagai penyedia pelayanan non tunai. Kerugian terungkap berdasarkan hasil audit tim independen. Dugaan penggelapannya, jelas Ekawana, berjalan layaknya 'gali lobang, tutup lobang'. Jadi setiap ada komplain nasabah terkait nominal tabungannya, kekurangan ditutupi dengan mengambilnya dari rekening nasabah lain. "Jadi kalau ada komplain, baru masuk. Ditutup uang dari nasabah lain, begitu cara mainnya," kata dia. Modus penggelapan demikian diduga terjadi sejak tahun 2012. Karena saling tutup, modus ini tidak terdeteksi Sistem Pengendali Internal (SPI). "Makanya hasil audit yang muncul ini ketika terlapor sudah pindah jabatan," ucapnya. Penyidikan kasus dugaan *money game* di Bank NTB Syariah ini berawal dari adanya laporan. Dari penyidikan sementara, kerugian muncul dari dana transaksi 440 nasabah Bank NTB Syariah. Ada dugaan peran oknum orang dalam yang sengaja melakukan manipulasi transaksi ratusan rekening nasabah.

Dari beberapa fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas di perbankan syariah masih banyak yang mengalami kerugian. Dengan adanya fenomena itu membuktikan bahwa turunnya profitabilitas dialami karena beberapa

faktor. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas adalah:

1. Faktor pertama adalah *CAR* yang diteliti oleh Siti Yuhanah (2016), Misbahul Munir (2018), Ike Dwi Astuti (2017), Renniwaty (2018), Muh Rajab Lubis (2018), Aprilyana Rahmawati (2018), Nur Janah (2018), Yuwita Ariessa (2020), Purnawingsih (2020).
2. Faktor kedua adalah *NPF* yang diteliti oleh Nur Mawaddah (2016), Siti Yuhanah (2016), Misbahul Munir (2018), Ike Dwi Astuti (2017), Renniwaty (2017), Muh Rajab Lubis (2018), Aprilyana Rahmawati (2018), Petricia Yuni (2018), Nur Janah (2020), Dila Anggraeni (2020).
3. Faktor Ketiga adalah *FDR* yang diteliti oleh Ike Dwi Astuti (2017), Renniwaty (2017), Misbahul Munir (2018), Petricia Yuni (2018), Aprilyana Rahmawati (2018), Nur Janah (2020), Yuwita Ariessa (2020).
4. Faktor Keempat adalah Inflasi yang diteliti oleh Misbahul Munir (2018), Fitra Rizal (2018), Petricia Yuni (2018), Oktavia Rosana Dewi (2020).
5. Faktor kelima adalah *Islamic Corporate Governance* yang diteliti oleh Purnawingsih dan Riana Cristel Tumewu (2016), Esti (2020), Cynthia Zara (2020), Dwi Lutfiana (2021), Dede Asi Mardiana (2021), Yusvita Nena (2021), Istiana Lailufa (2021).
6. Faktor keenam adalah *Islamic Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Purnawingsih dan Esti (2020), Cynthia Zara (2020), Dwi

Lutfiana (2021), Dede Asi Mardiana (2021), Yusvita Nena (2021), Istiana Lailufa (2021).

7. Faktor Ketujuh adalah NPM yang diteliti oleh Renniwaty
8. Faktor kedelapan adalah *BOPO* yang diteliti oleh Siti Yuhanah (2016), Ike Dwi Astuti (2016), Renniwaty (2016), Petricia Yuni (2018), Nur Janah (2020), Bimo Haryo Setyoko (2020).
9. Faktor kesembilan adalah Nilai Tukar yang diteliti oleh Muh Rajab Lubis (2018), Rony Malavia (2020).
10. Faktor kesepuluh adalah Dana Pihak Ketiga yang diteliti oleh Oktavia Rosana Dewi (2020).
11. Faktor kesebelas adalah *BI Rate* yang diteliti oleh Oktavia Rosana Dewi (2020).
12. Faktor keduabelas adalah *NPL* yang diteliti oleh Apriliyana Rahmawati (2019).
13. Faktor ketigabelas adalah *LDR* yang Apriliyana Rahmawati (2019).
14. Faktor keempatbelas adalah *Growth PDB* yang diteliti oleh Siti Yuhanah (2016)
15. Faktor kelimabelas adalah *Intelectual Capital* yang diteliti oleh Imelda Dian Rahmawati, Dwi Rahayu (2020).



13	Imelda Dian Rahmawati & Duwi Rahajo	2020	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
14	Rony Malavia	2020	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	--	-	-	-	-	-
15	Yuwita Ariessa Pravajanti	2020	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bimo HARYo Setyoko	2020	-	X	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Purnawingsih & Esti	2020	√	-	-	-	X	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dwi Lutfiana	2021	-	-	-	-	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dede Asi Mardani	2021	-	-	-	-	X	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Yusvita Nena & Istiana Lailavifa	2021	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Chintya Zara & Erinos						√	X										

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda x = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Chintya Zara Ananda, Erinos NR (2020) dengan judul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Perbankan Syariah”.

Variabel-variabel yang diteliti oleh Chintya Zara Ananda, Erinoss NR (2020) yaitu Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Responsibility sebagai variabel Independen dan Kinerja Perusahaan sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitian ini dilakukan di bulan Februari 2020. Periode tahun data (2012-2018). Unit analisis pada penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2012-2018 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dimana Chintya Zara dan Erinoss mengambil sampel pada Sampel yang terpilih adalah perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kriteria tertentu yang mendukung penulis yaitu sebanyak 7 Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini adalah ICG dan ICSR yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa keterbatasan peneliti yaitu:

1. Penelitian ini hanya memiliki sampel yang kecil karena jumlah perbankan syariah yang masih sedikit di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada Bank Umum Syariah, karena jenis perbankan syariah lain seperti Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah belum memiliki annual report.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang pertama adalah dalam penelitian ini penulis menilai kinerja perbankan hanya dilihat dari satu indikator profitabilitas yaitu hanya dengan menggunakan ROA. Sedangkan penelitian terdahulu

menggunakan 6 indikator untuk menilai kinerja perusahaan dengan pengolahan data PLS yang didalamnya ada EDR, IIVSNII, ROA, ROE, ZPR, PSR

Perbedaan yang kedua adalah dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019-2020, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2012-2018. Alasan penulis meneliti periode tahun 2019-2020 karena Di tengah pandemic (2019-2020), perbankan syariah mengalami penurunan dalam tingkat profitabilitas Hal ini terlihat penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan industri perbankan syariah bisa tumbuh negatif pada tahun ini karena tertekan pandemi virus corona atau covid-19. Tak hanya itu, nilai aset dan likuiditas juga bisa menurun. "Ada risiko peningkatan kesulitan likuiditas, penurunan kualitas aset keuangan dan profitabilitas serta risiko pertumbuhan perbankan syariah melambat atau bahkan negatif," ucap Ani, sapaan akrabnya di forum diskusi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Kamis (23/7). Bendahara negara yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IAEI itu mengatakan risiko itu sudah tercermin dari penurunan indeks ketahanan industri perbankan syariah yang dirilis usai pandemi corona mewabah di Indonesia. Data Jakarta Islamic Index (JII) mencatat indeks turun sekitar 6,44 persen ke kisaran di bawah 400 pada Maret 2020 saat kasus positif virus corona pertama diumumkan.

konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variable independen yaitu *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riana Cristel Tumewu (2016), Dwi Lutfiana (2020), Chintya Zara & Erinoss (2020), dan Yusvita Nena & Istiana Lailavifa menyebutkan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purnawingsih & Esti (2020) dan Dede Asi Mardani (2021) menyebutkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnawingsih & Esti (2020), Dede Asi Mardani (2021) dan Yusvita Nena & Istiana Lailaulfa (2021) menyebutkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Rosana Dewi (2020), Chintya Zara Ananda & Erinoss (2020), dan Dwi Lutfiana (2021) menyebutkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019-2020).”**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih ada perbankan syariah yang mengalami kerugian atau penurunan profitabilitas.
2. Penyebab terjadi penurunan profitabilitas dikarenakan adanya pandemic covid-19 dimana masyarakat mengalami krisis ekonomi dan kurangnya peninjauan data data keuangan.
3. Dampak yang terjadi dari penurunan profitabilitas banyak nya karyawan yang diberhentikan, nasabah yang kehilangan kepercayaan dan investor yang menarik saham nya.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan *ICG* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2019-2020.
2. Bagaimana pengungkapan *ICSR* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2019-2020.
3. Bagaimana profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2019-2020.

4. Seberapa besar pengaruh pengungkapan *ICG* dapat meningkatkan profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2019-2020.
5. Seberapa besar pengaruh pengungkapan *ICSR* dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2019-2020.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengungkapan *ICG* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2019-2020.
2. Untuk mengetahui pengungkapan *ICSR* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2019-2020.
3. Untuk mengetahui profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2019-2020.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengungkapan *ICG* dapat meningkatkan profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2019-2020.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengungkapan *ICSR* dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2019-2020.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

1. Pengungkapan *ICG* dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya dalam meningkatkan profitabilitas.
2. Pengungkapan *ICSR* dapat digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh kegiatan sosial dapat menarik nasabah dengan tujuan meningkatkan profitabilitas.
3. Profitabilitas dapat memberikan informasi tentang persentase perkembangan laba yang diperoleh dari waktu ke waktu dalam perbankan syariah.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:

##### **1.4.2.1 Bagi Penulis**

1. Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* digunakan penulis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nya terhadap profitabilitas perbankan syariah
2. Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* digunakan penulis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nya terhadap profitabilitas perbankan syariah

3. Profitabilitas digunakan penulis untuk mengetahui kinerja perbankan Syariah dalam menghasilkan laba dari waktu ke waktu.

#### **1.4.2.2 Bagi Bank Syariah**

1. Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* digunakan untuk menggambarkan seberapa besar bank berhasil menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat dan memastikan kegiatan perbankan bersifat transparan.
2. Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* digunakan untuk melihat seberapa besar tanggung jawab bank syariah terhadap pihak yang terlibat dan terdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung.
3. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba setiap tahunnya.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2020. Untuk memperoleh informasi dan pengambilan data peneliti mengunjungi situs resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan situs resmi masing-masing bank umum syariah yang menjadi penelitian.

#### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai selesai.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

###### **2.1.2.1 Akuntansi**

###### **A. Definisi Akuntansi**

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah: "... sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan."

Menurut Zakiyudin (2013:2) akuntansi adalah: "... proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut."

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) akuntansi adalah: "... *accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers*".

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, melaporkan aktivitas/transaksi

perusahaan dalam bentuk informasi keuangan serta melaporkan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## **B. Bidang Akuntansi**

Bidang akuntansi mempunyai bidang-bidang kekhususan sebagai akibat dari perkembangan dan tuntutan zaman.

Menurut Zakiyudin (2013:7) bidang-bidang akuntansi antara lain:

1. “Akuntansi Keuangan (*financial accounting*)  
Berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar seperti investor, badan pemerintah, dan pihak luar lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang perlu diperhatikan adalah keharusan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di suatu Negara. Standar akuntansi keuangan di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
2. Audit (*auditing*)  
Bidang ini berhubungan dengan proses pengauditan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Tujuan dari pelaksanaan audit adalah agar informasi akuntansi yang disajikan dapat lebih dipercaya karena ada pihak lain yang memberikan pengesahan, untuk memastikan ketaatan terhadap prosedur yang berlaku, untuk menilai efektifitas dan efisiensi dari suatu kegiatan. Objektivitas dan independensi adalah sesuatu yang mendasari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Akuntan tunduk pada standar auditing dan kode etik akuntan dalam melaksanakan proses audit. Standar ini dinamakan Standar Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Disamping menggunakan jasa akuntan publik, umumnya banyak perusahaan besar yang memiliki auditor internal (*internal auditor*) untuk melakukan pemeriksaan sejauh mana tiap-tiap bagian dalam perusahaan telah mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan.
3. Akuntansi Manajemen (*management accounting*)  
Beberapa manfaat dari akuntansi manajemen adalah mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas dan memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. *Trend* baru dalam akuntansi manajemen adalah pengendalian perusahaan melalui proses aktivitas yang dijalankan (*activity based management*). Saat ini akuntan publik

telah mengembangkan penyedia jasa konsultasi bisnis (*business consulting*) dan jasa konsultasi ekonomi dan keuangan (*economic and financial consulting*).

4. Akuntansi Biaya (*cost accounting*)  
Bidang akuntansi ini erat kaitannya dengan penetapan dan kontrol atas biaya terutama berhubungan dengan biaya produksi dan distribusi suatu barang. Fungsi utama akuntansi biaya adalah mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisa data mengenai biaya-biaya baik biaya yang sudah maupun yang akan terjadi. Berguna bagi manajemen sebagai salah satu alat kontrol atas kegiatan yang sedang, telah dan perencanaan di masa yang akan datang.
5. Akuntansi Perpajakan (*tax accounting*)  
Dikarenakan tujuan akuntansi ini adalah untuk tujuan perpajakan, maka konsep tentang transaksi, kejadian keuangan, bagaimana mengukur dan melaporkannya ditetapkan oleh peraturan pajak. Peraturan pajak memiliki peran yang besar terhadap keputusan usaha yang dilakukan perusahaan. Seorang akuntan dapat berperan dalam perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan peraturan perpajakan, dan mewakili perusahaan dihadapan kantor pajak.
6. Penganggaran (*budgeting*)  
Merupakan bidang yang berkaitan dengan penyusunan rencana keuangan dalam hal kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, menganalisis dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.”

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)  
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)  
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)  
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)  
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)  
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)  
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
8. Akuntansi Organisasi Nir laba (*Non Profit Accounting*)  
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

### C. Akuntansi Syariah

Menurut Triyuwono (2012:104) pengertian akuntansi syariah adalah:

“... akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, *emansipatoris*, *transcendental* dan *teological*”.

Menurut Sumar'in (2012:4) Akuntansi Syariah adalah:

“... akuntansi syariah diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah”.

Definisi Akuntansi Islam (Syariah) menurut *American Accounting Association (AAA)* adalah:

“... the “accounting“ process which provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that the entity is countinously operating within the bounds of the islamic shari'ah and delivering on its socioeconomics objectives.”

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan Akuntansi Syariah adalah suatu dekonstruksi akuntansi modern yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian dan peringkasan transaksi keuangan berdasarkan prinsip Islam.

**a. Tujuan Akuntansi Syariah**

Secara filosofis, akuntansi syariah bukanlah sebuah ilmu yang tercipta sebagai perlawanan terhadap teori akuntansi Barat. Lebih dari itu akuntansi syariah merupakan sebuah penyempurnaan sekaligus ikatan dari sistem pencatatan aktivitas syariah sebuah usaha. Secara umum tujuan akuntansi dengan konvensional tidak jauh berbeda. Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Sumar'in (2012:104) meliputi:

1. "Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan.
3. Meningkatakan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha."

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan untuk analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa, namun pada tataran praktis dan aplikasi pencatatan hal ini tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara akuntansi syariah dan konvensional.

## **b. Prinsip Umum Akuntansi Syariah**

Menurut Muhammad (2005:11) nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat *Al-Baqarah* ayat 282:

### 1. Prinsip pertanggungjawaban.

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan keuangan akuntansi.

### 2. Prinsip keadilan.

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat *Al-Baqarah* mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja

merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat *Al-Baqarah*, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap bepijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

### 3. Prinsip kebenaran.

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan

dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat diciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

### **2.1.2.2 Pelaporan Keuangan**

#### **A. Definisi Laporan Keuangan**

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan adalah: "... laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu."

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah: "... laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu."

Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah: "...laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

#### **B. Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Irham Fahmi (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah: "... untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter."

Menurut Kasmir (2013:8) mengemukakan beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.”

### C. Jenis Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:22) pada umumnya sebuah laporan keuangan terdiri dari:

1. “Neraca (*balance sheet*)
2. Laporan laba rugi (*income statement*)
3. Laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*)
4. Laporan arus kas (*cash flow statement*)
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statement*)”.

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adri (2012:30) adalah sebagai berikut:

1. “Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/atau laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*) selama periode.
2. Laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equities*) selama periode.
3. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) pada akhir periode.
4. Laporan arus kas (*statement of cash flows*) selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.

6. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.”

### 2.1.2 Teori *Agency*

Teori *agency* mengungkapkan adanya hubungan antara principal dan agent yang dilandasi dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung resiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini mengatakan hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*).

Teori ini juga mengungkapkan terjadinya pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*) menimbulkan *agency problem*, selanjutnya pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi yaitu suatu keadaan di mana agent memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak principle. Asimetri informasi muncul ketika agent lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan tentang informasi yang diketahui oleh principal dan stakeholder lainnya (Anugerah, 2014), berdasarkan asumsi sifat dasar manusia, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan pribadinya (Jensen and Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan menyebabkan agent menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada

principal dengan cara memberikan atau menahan informasi yang diminta principal bila menguntungkan bagi *agent* (Jensen and Meckling, 1976).

Jensen dan Meckling (1976) juga mengatakan bahwa manajemen perusahaan sebagai agent bagi para pemegang saham akan bersikap sebagai pihak yang selalu mementingkan kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Manajemen punya indikasi untuk bertindak demi keuntungan mereka sendiri bukan untuk kepentingan organisasi maupun keseluruhan *stakeholder* dan *shareholder*, sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan hubungan di antara seluruh stakeholder ini terjamin dan mencegah berkembangnya konflik keagenan tersebut (Anugrah, 2014).

### **2.1.2.1 Perbankan Syariah**

#### **A. Pengertian Perbankan**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:

“...badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Umam dan Utomo (2017:5) mendefinisikan perbankan adalah :

“... lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Menurut Muhammad (2016:1) pengertian bank adalah: “... lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang”.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bank adalah sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## **B. Pengertian Syariah**

Menurut Muhammad Syaltut dalam Khalid (2017) pengertian syariah adalah:

“... hukum atau aturan diciptakan Allah, atau hukum yang diciptakan secara garis besarnya agar manusia berpegang kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah, kepada sesama muslim dan sesama manusia, alam lingkungan serta pada kehidupannya yang lebih luas”.

Menurut Muhammad Ali al-Thahanawi dalam Muhaimin (2015) pengertian syariah adalah sebagai berikut:

“... hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi-Nya, baik itu sebagai hukum *furu* (cabang) dan *al-amaliyah* (perbuatan) dan untuknya dihimpunlah “ilmu *figh*” atau berhubungan dengan cara menentukan kepercayaan yang disebut hukum pokok yang untuknya dihimpunlah ilmu kalam”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan prinsip syariah adalah “Prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan syariah adalah peraturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya dalam menjalani kehidupannya yang lebih luas.

### **C. Pengertian Perbankan Syariah**

Menurut Umam dan Utomo (2017:1) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut:

“Institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bank syariah adalah “... bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”.

Menurut Arwani (2016:77) pengertian bank islam adalah “... lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam”.

Menurut Muhammad (2016:1) pengertian bank syariah adalah: “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:1) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut:

“Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba) dan bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal”.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang bebas dari bunga (riba) dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan prinsip hukum islam.

#### **D. Karakteristik Perbankan Syariah**

Menurut Ascarya (2007:204) karakteristik perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. “Sistem Keuangan dan Perbankan  
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah pertama berdiri pada tahun itu juga. Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya UU Perbankan yang baru No. 10 Tahun 1998. Semenjak itu bermunculan lembaga-

lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional.

2. Aliran Pemikiran

Mayoritas penduduk muslim Indonesia menganut mazhab (*school of thought*) Syafi'i seperti yang dianut oleh muslim dan pemerintah Malaysia. Namun ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan ulama timur tengah. Oleh karena itu akad-akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah merupakan akad-akad yang sudah mendapatkan kesepakatan dari sebagian besar ulama (jumhur ulama). Dengan prinsip kehati-hatian ini akad-akad yang masih menimbulkan kontroversi tidak digunakan dalam praktik.

3. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang

Bank syariah di Indonesia baik yang berbentuk bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) maupun bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) berada di bawah undang-undang perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual-beli, sewa dan prinsip lainnya yang dibolehkan syariah. Dengan demikian bank syariah di Indonesia merupakan bank universal yang dapat berusaha sebagai *consumer banking, investment banking, merchant banking, leasing company, investment agent* dan sebagai lembaga amil zakat infak dan sadaqah.

4. Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama islam baik ibadah maupun muamalah termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan. Keberadaan DSN – MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun karena beragamnya urusannya urusan yang ditangani oleh DSN – MUI dan tidak adanya spesialis khusus di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah tanggapan DSN – MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.

5. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah dan Produknya

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk – produknya Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai syariah (*comply to sharia principles*) dan tidak mengadopsi akad yang

kontroversial. Dengan strategi pengembangan yang dipilih perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu sistem perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu pengembangan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan sektor lain dengan prinsip syariah.”

### **E. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah**

Prinsip-prinsip dasar bank syariah menurut M. Syafi'i Antonio dalam Umam dan Utomo (2017:2) adalah:

1. “Prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*);
2. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*);
3. Prinsip jual beli (*sale and purchase*);
4. Prinsip sewa (*operasional lease and financial lease*);
5. Prinsip jasa (*fee based service*)”.

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:4) sebagai berikut:

1. “Bebas dari bunga (*riba*);
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*);
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*);
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal”.

### **F. Peran dan Fungsi Perbankan Syariah**

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:13) bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu:

1. Sebagai badan usaha (*tamwil*);
2. Sebagai badan sosial (*maal*).

Sedangkan fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. “Manajer Investasi  
Sebagai manajer investasi bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).
2. Investor  
Sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
3. Penyedia Jasa Perbankan  
Sebagai penyedia jasa perbankan bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qard* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing) dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyah*.
4. Badan Sosial  
Sebagai badan sosial bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah (ZIS) serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan)”.

Dari peran dan fungsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam bank syariah terdapat dua peran yaitu sebagai badan usaha dan sebagai badan sosial. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya baik sebagai investor atau pelaksana investasi merupakan hubungan seacara kemitraan tidak seperti hubungan pada bank konvensional yang bersifat debitur dan kreditur.

### **G. Tujuan Perbankan Syariah**

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:27) tujuan Perbankan Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan suatu keadilan, kebersamaan serta pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sudarsono (1996) dalam Arif dan Rahmawati (2018:2) bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. “Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar. Selain dilarang dalam islam, jenis usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu diedukasi untuk menjauhkan diri dari kegiatan muamalat yang bertentangan dengan syariat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan. Hal ini hanya dapat dilakukan jika perbankan syariah memprioritaskan sektor riil dalam kegiatan bisnisnya.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga”.

#### **H. Jenis Kegiatan Usaha Perbankan Syariah**

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:14) jenis kegiatan usaha bank syariah sebagai berikut:

1. “Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial- ekonomi islam. Dalam hal ini bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba) melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan).

## 2. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dana bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli) dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.

## 3. Jasa Pelayanan

Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini mencakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan antara lain *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana atau utang dari depositor/debitor ke penerima/kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau *mortgage*), *sharf* (jual beli mata uang).

## 4. Kegiatan Sosial

Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam menjalankan usahanya bank syariah selalu memperhentikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh bank termasuk dalam pembiayaan. Keuntungan meskipun penting dan merupakan prioritas bukan merupakan kriteria satu-satunya dalam mengevaluasi performance suatu bank syariah karena hal ini harus juga sejalan dengan tujuan-tujuan material dan sosial yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.”

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan secara garis besar jenis kegiatan bank syariah terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa dan kegiatan sosial. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.3 Pengungkapan Islamic Corporate Governance

#### 2.1.3.1 Pengungkapan

##### A. Definisi Pengungkapan

Menurut Evans (2010) pengungkapan adalah:

*“... disclosure means supplying information in the financial statements including the statements themselves, the notes to the statements and the implementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements”.*

Menurut Wolk, Tearney, and Dold (2001) pengungkapan adalah:

“... berkaitan dengan informasi baik dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan, diskusi dan analisis manajemen, prakiraan keuangan dan operasi, dan laporan keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari biaya historis.”

Menurut Hani (2018:88) definisi Pengungkapan adalah “...Pengungkapan (disclosure) merupakan bagian dari pelaporan keuangan, yaitu langkah paling akhir dari proses pelaporan keuangan dengan menyajikan informasi akuntansi dalam bentuk *financial statement*.”

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan Pengungkapan merupakan penyajian semua informasi yang diperlukan investor didalam laporan atau pelaporan keuangan. Pengungkapan dapat berupa pengungkapan wajib atau pengungkapan sukarela.

##### B. Fungsi dan Tujuan Pengungkapan

Dalam buku Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Suwardono, 2008) menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan adalah “menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan

keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dalam implementasinya, investor dan kreditor bervariasi dalam hal kecanggihannya (*sophistication*). Hal ini dikarenakan pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, sehingga pengungkapan dapat diwajibkan untuk melindungi (*protective*), informatif (*informative*), dan melayani kebutuhan khusus (*differential*).

#### 1. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*). Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi.

#### 2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

#### 3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.”

Di sisi lain, dalam buku *Accounting Theory*, Riahi dan Belkaoui (2006)

menjelaskan bahwa tujuan dari pengungkapan diantaranya:

1. “Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
2. Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.”

### C. Luas Pengungkapan

Luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan (*levels of disclosure*). Evans (2003: 336) dalam Suwardjono (2008) mengidentifikasi tiga pengungkapan yang dilakukan perusahaan, yaitu:

1. *“Adequate Disclosure* (Pengungkapan Cukup)  
Adequate disclosure merupakan konsep yang sering digunakan, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar)  
Fair disclosure secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. *Full Disclosure* (Pengungkapan Penuh)  
Full disclosure menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan. Scott (1997) dalam Suwardjono (2008) menunjukkan dua manfaat pengungkapan penuh yang dapat dicapai secara simultan, yaitu terdapat kemungkinan investor membuat keputusan investasi menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif.”

### D. Sifat Pengungkapan

Sifat pengungkapan yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yakni pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*discretionary disclosure*). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Suwardjono (2008) mengungkapkan bahwa teori

pensinalan (*signaling theory*) melandasi pengungkapan sukarela. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.

#### **E. Metode Pengungkapan**

Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut (Suwardjono, 2008). Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan diantaranya sebagai: pos statemen keuangan, catatan kaki (catatan atas statemen keuangan), penggunaan istilah teknis (terminologi), penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi.

### **2.1.3.2 Islamic Corporate Governance**

#### **A. Definisi Islamic Corporate Governance**

Bhatti & Bhatti (2009) mendefinisikan *Islamic Corporate Governance*: “...Tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam, di mana kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasar pada moral dan nilai-nilai syariah”.

Menurut Hakim (2002) *Islamic Corporate Governance* adalah :

“...tata kelola perusahaan adalah mekanisme di mana masalah keagenan para pemangku kepentingan korporasi, termasuk pemegang saham, kreditor, manajemen, karyawan, konsumen, dan masyarakat luas dibingkai dan diupayakan untuk diselesaikan.”

Abdul Ghani (2005:139) mendefinisikan *Islamic Corporate governance* :

“...tata kelola perusahaan Islami dapat didefinisikan sebagai sistem manajemen yang menempatkan pertanggung jawaban spiritualitas, dengan prinsip dasar transparan, bertanggungjawab, akuntabilitas, moralitas dan keandalan hanya sebagai alat ukur yang sifatnya material, sementara yang paling penting dan hakiki adalah sebagai ibadah makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (mardhatillah)”.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan *Islamic Corporate Governance* adalah tata Kelola perusahaan berupa sistem manajemen berdasarkan prinsip Syariah.

## **B. Prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance***

Larbsh (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan prinsip- prinsip

*Islamic Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

### 1. “Akuntabilitas

Muslim percaya bahwa mereka akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang mereka lakukan. Surah *Al-Baqarah* ayat 284 mengatakan "Kepunyaan Allah SWT semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan apakah anda mengungkapkan apa yang ada dalam diri anda atau menyembunyikannya, Allah SWT akan memanggil anda untuk mempertanggungjawabkannya". Akuntabilitas dalam Islam adalah pertanggung jawaban kepada Allah SWT dan kepada masyarakat untuk semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Islam meminta agar setiap orang dapat menghormati properti publik, karenahitu korupsi dan perilaku tidak berterima lainnya telah dilarang oleh nilai-nilai Islam.

### 2. Transparansi dan Pengungkapan

Allah SWT telah mendorong transparansi dalam Surah *Al- Baqarah* ayat 282 yang berbunyi “Hai kamu, yang beriman! ketika anda mengontrak hutang untuk jangka waktu tertentu, tuliskan. Biarkan seorang juru tulis

menuliskannya di hakim di antara kamu”, dan Surah *An-Naml* ayat 25 yang berbunyi "... dan Allah SWT tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu ungkapkan". Nilai-nilai Islam menekankan pada dilaksanakannya pengungkapan fakta keuangan yang benar dan adil dan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk membayar zakat yang akurat.

### 3. *Responsibility*

Konsep dapat dipercaya dinyatakan dalam Surah *Al-Anfal* ayat 27 yang berbunyi “Hai kamu, yang beriman! Jangan mengkhianati Allah SWT dan Rasul-Nya, juga jangan mengkhianati amanat anda (hal-hal yang dipercayakan kepada Anda dan semua tugas yang telah Allah SWT tetapkan untuk anda)”. Islam menetapkan sistem zakat dan mendorong orang-orang beriman untuk memberikan uang kepada orang miskin, selain itu Islam juga menghukum pencuri tanpa diskriminasi antara orang-orang untuk memurnikan komunitas Islam dan untuk mempertahankan hak milik orang lain. Islam menuntut tanggung jawab yang tinggi dan lebih efektif daripada metode hukuman konvensional, karena itu umat Islam harus percaya bahwa apa pun yang mereka lakukan selama hidup mereka harus dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam.

### 4. Keadilan

Islam sangat ketat tentang keadilan dan independen. Muslim harus melakukan kegiatan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti bersikap adil dan jujur (Lewis, 2001). Pengaruh peraturan Islam pada kegiatan bisnis jelas dengan melarang adanya monopoli. Al-Qur'an Surah *An-Nisa* ayat 29 mengatakan “Hai kamu, yang beriman! Jangan makan properti anda di antara anda sendiri secara tidak adil kecuali itu adalah perdagangan diantara anda, dengan persetujuan bersama.”

## C. Pengukuran *Islamic Corporate Governance*

Pengukuran *ICG* dalam penelitian ini dikembangkan dari standar tata kelola perusahaan lembaga keuangan berbasis syariah Internasional yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*. *ICG* dalam penelitian ini mencakup dua kategori utama yaitu *Shariah Governance (SG)* dan *General Governance (GG)*. *Sharia Governance* terdiri dari 3 dimensi yaitu Dewan Pengawas Syariah, Unit Internal Kepatuhan Syariah, dan Unit Internal Tinjauan Syariah atau audit yang menggambarkan sistem tata kelola berdasarkan Syariah. *General Governance* terdiri dari 7 dimensi yang menggambarkan sistem tata kelola perbankan Islam umum yaitu dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, kontrol internal dan audit

eksternal, manajemen risiko, dan *Investment Account Holders* (IAH). Jadi, total *ICG* terdiri dari 8 dimensi yang mencakup 6 item pengungkapan.

### **2.1.3.3 Pengungkapan Islamic Corporate Governance**

Menurut IFSB pengungkapan *ICG*: "... Pengungkapan *ICG* adalah pengungkapan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pedoman syariah, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan dengan cara mengungkapkan beberapa item yang telah diatur dalam syariah governance”.

Pengungkapan *ICG* adalah pelaporan berkaitan dengan informasi yang diterima oleh pihak manajemen yang berhubungan dengan tata Kelola perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah.

Pengungkapan *ICG* adalah penyajian prinsip prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan yang tidak menyimpang dari prinsip syariah.

### **2.1.4 Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility**

#### **2.1.4.1 Definisi *Islamic Corporate Social Responsibility***

Menurut Khursid (2014) *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* adalah : "... konsep tanggung jawab social perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Qur'an dan Hadits.”

Menurut Gustani (2017) *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah :  
 “... Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya berdasarkan nilai-nilai islamnya.”

Syukron (2015) mendefinisikan CSR dalam perspektif Islam adalah :  
 “...konsekuensi inheren dari ajaran islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (Maqashid al-syariah) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan.”

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

#### **2.1.4.2 Perbedaan CSR konvensional dan CSR perspektif Islam**

Dapat ditemukan bahwa letak perbedaan antara *Corporate Social Responsibility* konvensional dengan *Islamic Corporate Social Responsibility*, yaitu apabila *Corporate Social Responsibility* konvensional hanya sebatas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholder dan masyarakat saja, tetapi jika *Islamic Corporate Social Responsibility* menjadikan Allah sebagai tanggung jawab utamanya selain masyarakat dan stakeholder. Dengan menjadikan Allah Subhanahuwata’ala sebagai tanggung jawab utama maka dapat menjadikan apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan mendapat ridho dari Allah Subhanahuwata’ala.

Selain itu juga dapat menghindarkan dari hal-hal muamalah yang dilarang seperti gharar, maysir, riba karena dilandasi dengan sikap taqwa kepada Allah

Subhanahuwata'ala. Pengungkapan *Islamic corporate social responsibility* menjadi sesuatu yang sangat penting bagi reputasi dan kinerja lembaga keuangan syariah. Karena lembaga keuangan syariah yang mengungkapkan *ICSR* dengan baik akan dipandang sebagai entitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat muslim dalam menyalurkan dana mereka (Thahirah et.al, 2016).

Namun di perusahaan syariah cara menyikapi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* seharusnya berbeda dengan perusahaan konvensional. Jika pada perusahaan konvensional pengungkapan *CSR* diorientasikan untuk menarik simpati investor tetapi di dalam perusahaan syariah pengungkapan *CSR* diharapkan lebih diorientasikan sebagai tanggung jawab kepada Allah Subhanahuwata'ala.

#### **2.1.4.3 Unsur-unsur dalam Implementasi *ICSR***

Menurut Muhammad Djakfar (2007), implementasi *CSR* dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan *CSR* dalam perspektif Islam dengan *CSR* secara Universal yaitu:

##### *1. Al-Adl*

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontral-kontrak serta perjanjian bisnis. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. Islam

juga melarang segala bentuk penipuan, *gharar* (spekulasi), *najsyi* (iklan palsu), *ihtikar* (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa* ayat 29.

## 2. Al-Ihsan

Islam hanya memerintahkan dan menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi CSR dengan semangat ihsan akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena atas ridho Allah SWT. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an Surat *Az-Zumar* Ayat 10.

## 3. Manfaat

Konsep manfaat dalam CSR lebih dari aktivitas ekonomi. Bank syariah sudah seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak statis misalnya terkait bentuk *philanthropi* dalam berbagai aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum marginal, pelestarian lingkungan.

## 4. Amanah

Perusahaan yang menerapkan CSR harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundaknya misalnya menciptakan produk yang berkualitas, serta menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas bisnis. Amanah dalam

perbankan dapat dilakukan dengan pelaporan dan transparan yang jujur kepada yang berhak, serta amanah dalam pembayaran pajak, pembayaran karyawan, dan lain-lain.

#### **2.1.4.4 ICSR dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Hal ini dapat dipahami sebagai sebuah bentuk aktifitas Lembaga Keuangan Syariah untuk menyempurnakan kewajiban hubungan dengan Allah Subhanahu Wata'ala, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam sekitar dalam rangka menghasilkan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi perusahaan, masyarakat, dan alam sekitar (Yusuf, 2017:53).

Pelaksanaan ICSR pada Lembaga Keuangan Syariah ini menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban fungsi kekhalifahan kepada Allah Subhanahu Wata'ala sekaligus tanggung jawab sesama manusia dan tanggung jawab terhadap alam sekitar. ICSR pada Lembaga Keuangan Syariah bukanlah sekedar mencari keuntungan semata melainkan harus benar-benar menyentuh keperluan dasar masyarakat agar terbentuk perekonomian masyarakat yang lebih baik serta menjaga kelestarian alam bagi generasi yang akan datang.

#### **2.1.4.5 Manfaat *Islamic Corporate Social Responsibility***

Menurut Anci Lestari tahun 2018, Manfaat dalam melaksanakan ICSR dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut:

1. “Dapat membuat semua kegiatan perusahaan lebih merasa punya tanggungjawab karena berbasis syariah dan menambah keyakinan akan syariat islam sehingga mengurangi resiko kecurangan dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima oleh perusahaan maupun masyarakat.
2. Akan memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdernya.
3. Dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
4. Akan meningkatkan penjualan produk. Dalam riset *Roper Seacrh Worldwide* mengungkapkan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan CSR.”

#### **2.1.4.6 Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility**

Menurut (Khursid, 2014), *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* adalah: “... konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Qur’an dan Hadits.

Menurut IFSB pengungkapan Islamic Corporate Governance adalah:

“... Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah pengungkapan tanggung jawab sosial islami perusahaan yang diujur menggunakan index ISR (Islamic Sosial Responsibility) terhadap beberapa item yang telah ditentukan.

Pengungkapan *ICSR* adalah pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan organisasi terhadap kelompok khusus yang

berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip syariah.

## **2.1.5 Profitabilitas**

### **2.1.5.1 Definisi Profitabilitas**

Menurut R. Agus Sartono (2010:122): “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kesanggupan perusahaan dalam mendapatkan profit”.

Menurut Pramuka (2010) profitabilitas adalah:

“... profitabilitas mempunyai arti yang lebih berharga dari pada laba karena profitabilitas menunjukkan ukuran efisiensi kinerja perusahaan yaitu membandingkan laba yang didapat dengan kekayaan atau modal yang dihasilkan laba tersebut”.

Menurut Hasan pengertian profitabilitas adalah:

“... Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari performance sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi resiko yang ada”.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu laba yang memiliki ukuran spesifik dari performance sebuah bank.

### **2.1.5.2 Tujuan Profitabilitas**

Rasio Profitabilitas memiliki tujuan yang tidak hanya diperuntukkan bagi

manajemen perusahaan tetapi juga bagi pihak-pihak diluar perusahaan yang memiliki kepentingan. Menurut Kasmir (2015:197) tujuan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.”

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan tujuan dari rasio profitabilitas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

### **2.1.5.3 Manfaat Profitabilitas**

Manfaat dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

#### 2.1.5.4 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Sesuai dengan tujuan Mayang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Menurut Kasmir (2015:199) dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

##### 1. *Profit Margin On Sale*

*Profit margin on sales* atau *ratio profit margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{profit margin on sale} = \frac{\text{Earning After interest and Tax}}{\text{Sales}}$$

##### 2. Hasil Pengembalian Investasi atau (*Return on Investmen/ROI*)

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *return on investmen (ROI)* atau *return on total assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *ROI* juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Earning After interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

### 3. Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity/ ROE*)

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat begitu juga sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Earning After interest}}{\text{Equity}}$$

### 4. Laba Per Lembar Saham (*Earning per share of common stock*)

Rasio per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi. Rumusnya sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{saham biasa yang beredar}}$$

## 2.1.5.5 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81) mengemukakan 3 (tiga) cara pengukuran rasio profitabilitas yaitu:

#### 1. "Profit Margin

*Profit margin* adalah rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung pada analisis *common size* untuk laporan laba-rugi (baris paling akhir). Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menentukan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Rasio *profit margin* bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{profit margin} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan}}$$

### 2. *Return On Equity (ROE)*

*Return On Equity (ROE)* rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio *ROE* bisa dihitung sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{laba bersih}}{\text{modal saham}}$$

### 3. *Return On Asset (ROA)*

*Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. *ROA* juga sering disebut sebagai *ROI (Return On Investment)*. Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan *Return On Asset (ROA)* berdasarkan teoretis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. secara teoretis laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2009:118).

*Return On Asset* menurut (Dendawijaya, 2009:118) juga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

Dari beberapa pengukuran di atas metode pengukuran yang akan penulis gunakan yaitu menggunakan *Return On Asset (ROA)* karena *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari masyarakat. Semakin besar *ROA* suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset, begitu juga sebaliknya semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Menurut Fahmi (2015:137) *ROA* adalah "... rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan." Menurut Dendawijaya (2009:118) "*Return On Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan".

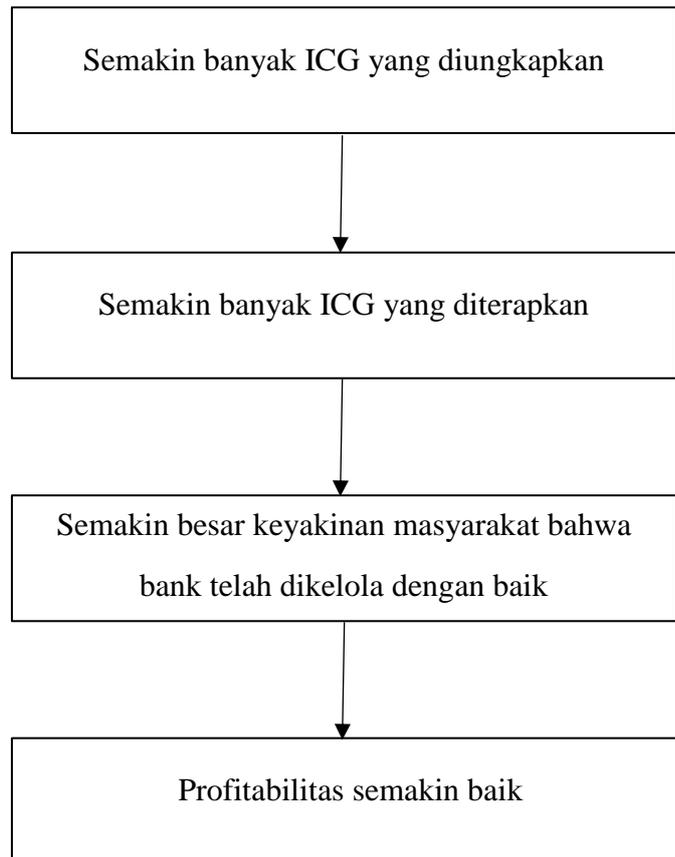
## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Governance (ICG) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah**

Peningkatan profitabilitas perbankan Syariah dapat diwujudkan, salah satunya dengan menerapkan konsep Islamic Corporate Governance (ICG). Dengan diterapkannya ICG, diharapkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa perbankan Syariah telah dikelola dengan baik dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Syariah, pengungkapan ICG diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah karena semakin banyak item yang diungkapkan maka semakin baik kinerja yang telah dilakukan oleh perbankan syariah (Mansour & Bhatti, 2018).

Perbedaan antara penerapan Corporate Governance di perbankan Syariah dan perbankan konvensional yaitu tunduk dan patuh terhadap prinsip-prinsip Syariah menjadi kewajiban bagi perbankan Syariah dalam mengoperasikan kegiatan bisnisnya dan juga terdapat Dewan Pengawas Syariah. Lingkungan bisnis yang semakin berkembang dengan latar belakang budaya yang beragam pula menjadikan prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance tidak selalu bisa diterapkan dalam semua kondisi. Dengan demikian perlu dilakukan suatu adopsi dan penerapan aturan baru untuk menghadapi inovasi keuangan yang cepat (Mollah, Hassan, Al Farooque, & Mobarek, 2017).

**Kerangka pemikiran Pengaruh Islamic Corporate Governance  
terhadap Kinerja Perbankan Syariah**



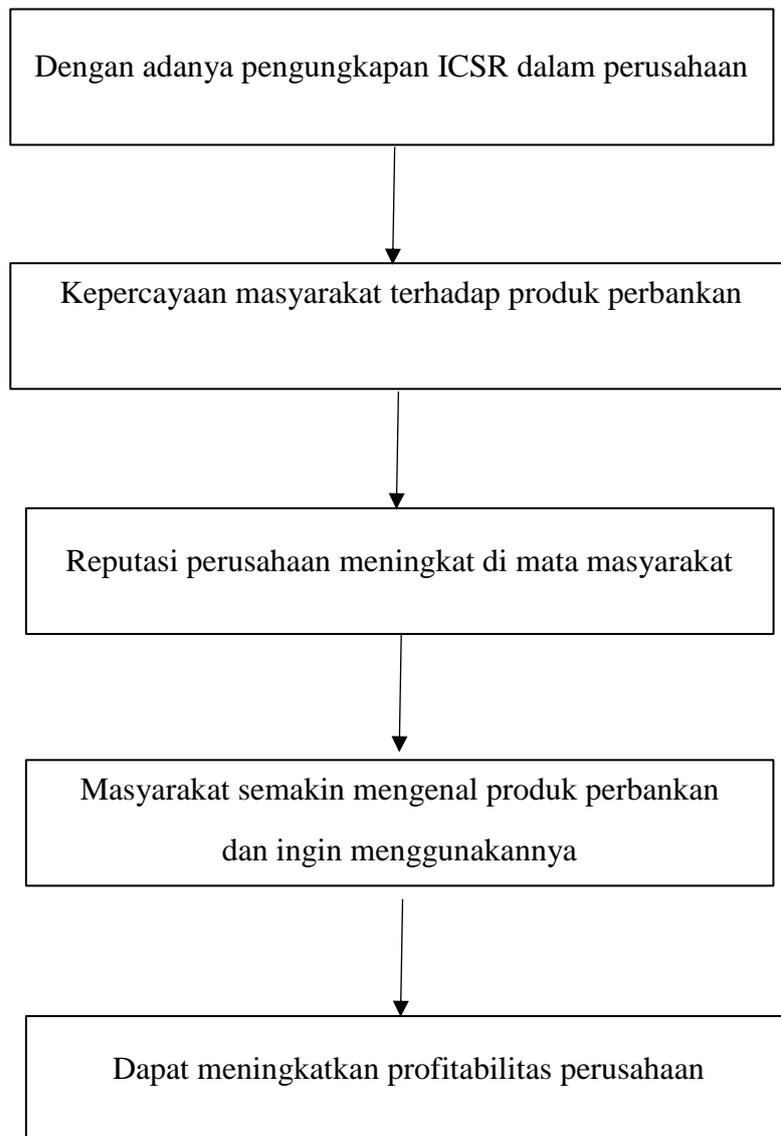
**2.2.2 Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility  
terhadap Perbankan Syariah**

Penerapan dan pengungkapan *ICSR* dipercaya dapat meningkatkan kinerja perbankan karena investor atau calon investor cenderung menanamkan modalnya kepada perbankan yang telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Perbankan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dianggap

memiliki keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan perbankan lain (Putri, 2014). Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham, hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan tersebut. Sebaliknya ketika tingkat profitabilitas rendah perusahaan akan berharap pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan (Hackston dan Milne, 1996 dalam Wuri Handayani, 2009:7). Semakin banyak item yang diungkapkan maka semakin baik kinerja yang telah dilakukan oleh perbankan syariah (Mansour & Bhatti, 2018).

Aktivitas CSR diharapkan berdampak positif bagi profitabilitas perusahaan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas dengan ROA. Dengan melakukan pengungkapan ICSR perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan sehingga reputasi perusahaan juga meningkat dimata masyarakat, akibatnya masyarakat semakin mengenal produk perusahaan dan berkeinginan untuk menggunakan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan (Maria Kartika, 2015)

**Kerangka pemikiran Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility  
terhadap Kinerja Perbankan Syariah**



### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1= Pengungkapan *ICG* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan

Syariah

H2= Pengungkapan *ICSR* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Perbankan

Syariah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti selama jangka waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:2), metode penelitian adalah: “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:8), metode kuantitatif adalah:

“... metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Sedangkan menurut Sugiyono (2017:147), metode penelitian deskriptif adalah:

“... metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Dalam penelitian ini metode deskriptif akan digunakan untuk mengetahui bagaimana *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility*. Penelitian dengan metode kuantitatif ini digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2020.

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah objek yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2016:38) objek penelitian adalah: "... suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengungkapan *Islamic corporate governance* dan *Islamic corporate social responsibility* sebagai variabel independen dan profitabilitas sebagai variabel dependen pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2020.

### **3.3 Unit Analisis dan Unit Observasi**

#### **3.3.1 Unit Analisis**

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah perusahaan perbankan. Dalam hal ini perusahaan yang diteliti adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2019-2020.

### 3.3.2 Unit Observasi

Dalam penelitian ini yang menjadi unit observasi adalah *annual report* bank umum syariah periode 2019-2020, yang telah dipublikasikan melalui situs web resmi masing-masing bank. yang meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi dan laporan manajemen tahunan bank umum syariah periode 2019-2020.

Data-data yang diperoleh dari laporan keuangan:

1. Adapun data dari laporan laba rugi meliputi laba sebelum pajak.
2. Adapun data dari laporan implementasi ICG.
3. Adapun data dari laporan implementasi ICSR.

## 3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

### 3.4.1 Definisi Variabel

Dalam sebuah penelitian terdapat variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum memulai pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2017:39) variabel penelitian adalah: “ Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan variabel-variabel tersebut dalam 2 (dua) jenis variabel yaitu Variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen) sebagai berikut:

### 3.4.1.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel independen adalah: “Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.”

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel independen yang diteliti, yakni:

#### 1. Pengungkapan ICG (X1)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi

Pengungkapan ICG dari Islamic Financial Service Board (IFSB) adalah:

“... pengungkapan ICG adalah pengungkapan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pedoman syariah, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan dengan cara mengungkapkan beberapa item yang telah diatur dalam syariah governance”.

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur

variabel pengungkapan ICG menurut (IFSB) adalah sebagai berikut:

$$\text{indeks ICG} = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{\text{total jumlah item pengungkapan}}$$

### Indeks Pengungkapan ICG

*Tabel 3.1*

No.	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
<b>A.</b>	<b><i>Sharia Governance (SG)</i></b>	
A1	Dewan Pengawas Syariah ( <i>Sharia Supervisory Board</i> )	9
A1-1	Jumlah Anggota DPS (Minimal 3)	
A1-2	Profil singkat anggota DPS (nama, jabatan, riwayat pendidikan, dan foto)	
A1-3	Tugas dan tanggung jawab DPS	
A1-4	Jumlah Rapat dan tingkat kehadiran	

	anggota DPS	
A1-5	Remunerasi anggota DPS	
A1-6	Pernyataan/opini syariah/fatwa DPS terhadap produk dan jasa bank	
A1-7	Prosedur / metode pengawasan yang dilakukan	
A1-8	Rekomendasi DPS untuk manajemen	
A1-9	Laporan DPS	
A2	Unit Kepatuhan Syariah Internal ( <i>Internal Shariah Compliance Unit</i> )	4
A2-1	Bank memiliki Unit Internal Syariah <i>Compliance</i>	
A2-2	Laporan Unit Internal Syariah <i>Compliance</i>	
A2-3	Kerangka kerja Unit Internal Syariah <i>Compliance</i>	
A2-4	Peran dan tanggung jawab Unit Internal Syariah <i>Compliance</i>	
A3	Unit Audit Syariah Internal ( <i>Internal Sharīah Review/audit Unit</i> )	4
A3-1	Bank memiliki Unit Internal <i>Sharīah Review/audit</i>	
A3-2	Laporan Unit Internal <i>Sharīah Review/audit</i>	
A3-3	Kerangka kerja Unit Internal <i>Sharīah Review/audit</i>	
A3-4	Peran dan tanggungjawab Unit Internal <i>Sharīah</i>	

	<i>Review/audit</i>	
<b>B.</b>	<b>General Governance (GG)</b>	
B1	Dewan Direktur ( <i>Board of Director</i> )	7
B1-1	Profil singkat anggota <i>BoD</i> (nama, jabatan, riwayat pendidikan, dan foto)	
B1-2	Jumlah Rapat dan tingkat kehadiran anggota <i>BoD</i>	
B1-3	Remunerasi anggota <i>BoD</i>	
B1-4	Tugas dan tanggungjawab <i>BoD</i>	
B1-5	Laporan <i>BoD</i>	

B1-6	Kepemilikan saham anggota <i>BoD</i>	
B1-7	Rekomendasi untuk manajemen	
B2	Dewan Komite ( <i>Board Committees</i> )	10
B2-1	Bank memiliki Komite Audit ( <i>audit committee</i> )	
B2-2	Bank memiliki Komite Remunerasi ( <i>remuneration committee</i> )	
B2-3	Bank memiliki Komite Nominasi ( <i>nomination committee</i> )	
B2-4	Bank memiliki Komite Pemantau Resiko ( <i>risk-monitoring committee</i> )	
B2-5	Bank memiliki Komite Governance ( <i>corporate governance committee</i> )	
B2-6	Tugas dan tanggungjawab masing-masing komite	
B2-7	Profil singkat anggota Dewan Komite (nama, jabatan, riwayat pendidikan, dan foto)	
B2-8	Jumlah Rapat dan tingkat kehadiran anggota dewan komite	
B2-9	Remunerasi anggota Dewan Komite	
B2-10	Kinerja masing-masing komite	
B3	Internal Kontrol dan Internal Audit ( <i>Internal Control dan External Audit</i> )	7
B3-1	Bank memiliki divisi internal audit & eksternal audit	
B3-2	Laporan internal audit & eksternal audit	
B3-3	Kerangka kerja internal audit & eksternal audit	
B3-4	Tugas dan tanggungjawab Internal Audit & eksternal audit	
B3-5	Kebijakan penunjukan auditor eksternal	
B3-6	Auditor eksternal yang ditunjuk oleh bank	
B3-7	Kinerja audit internal & eksternal audit	
B4	Manajemen Risiko ( <i>Risk Management</i> )	14
B4-1	Laporan manajemen risiko	
B4-2	Bank memiliki divisi manajemen risiko	
B4-3	Kerangka kerja divisi manajemen risiko	

B4-4	Tugas dan tanggungjawab divisi manajemen risiko	
B4-5	Manajemen risiko pasar	
B4-6	Manajemen risiko kredit	
B4-7	Manajemen risiko likuiditas	
B4-8	Manajemen risiko operasional	
B4-9	Manajemen risiko hukum	
B4-10	Manajemen risiko reputasi	
B4-11	Manajemen risiko strategic	
B4-12	Manajemen risiko kepatuhan	
B4-13	Manajemen risiko imbal hasil	
B4-14	Manajemen risiko investasi	
B5	<i>Investment Account Holders (IAH)</i>	9
B5-1	Jenis produk investasi	
B5-2	Karakteristik investor yang tepat	
B5-3	Prosedur pembelian, pencairan, dan distribusi	
B5-4	Pengalaman manajer portopolio, penasihat investasi, dan wali amanat	
B5-5	Pengaturan tata kelola dana Investasi	
B5-6	Pernyataan bahwa dana diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah	
B5-7	Informasi produk dan bagaimana cara investor memperolehnya	
B5-8	Dasar pengalokasian aset, dana, keuntungan dana investasi	
B5-9	Rasio keuangan yang terkait dengan dana investasi	
	Jumlah	64

## 2. Pengungkapan ICSR (X2)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi Pengungkapan ICSR dari Islamic Financial Service Board (IFSB) adalah:

“...pengungkapan tanggung jawab sosial islami perusahaan yang diujur menggunakan index *ISR (Islamic Sosial Responsibility)* terhadap beberapa item yang telah ditentukan.”.

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel pengungkapan *ICSR* menurut (*IFSB*) adalah sebagai berikut:

$$\text{indeks ICSR} = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{\text{total jumlah item pengungkapan}}$$

### Indeks Pengungkapan *ICSR*

*Tabel 3.2*

No.	Dimensi Pengungkapan	Jumlah Item
A.	Pendanaan dan Investasi ( <i>Finance and Investment</i> )	6
A1	Aktivitas yang mengandung riba (beban bunga & pendapatan bunga)	
A2	Kegiatan yang mengandung Gharar ( <i>hedging, future on delivery trading/margin trading, arbitrage baik spot maupun forward, short selling, pure swap, warrant</i> )	
A3	Zakat (jumlah, dan penyaluran)	
A4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih (denda)	
A5	Kegiatan Investasi (secara umum)	
A6	Proyek Pembiayaan (secara umum)	
B.	Produk dan Pelayanan ( <i>Product and Services</i> )	3
B1	Pernyataan DPS terhadap kehalalan produk dan jasa baru ISR	
B2	Jenis dan definisi setiap produk	
B3	Pelayanan atas pengaduan nasabah (bentuk, jumlah keluhan, dan penyelesaian)	
C.	Karyawan ( <i>Employee</i> )	14
C1	Jumlah karyawan	
C2	Jam Kerja	
C3	Hari libur	
C4	Tunjangan Karyawan	
C5	Kebijakan Remunerasi	
C6	Pendidikan dan Pelatihan Karyawan	

C7	Kesamaan peluang bagi seluruh karyawan	
C8	Apresiasi terhadap karyawan berprestasi	
C9	Kesehatan dan keselamatan karyawan ( <i>Workforce, Work Health and Safety</i> )	
C10	Keterlibatan karyawan di perusahaan	
C11	Tempat ibadah yang memadai	
C12	Waktu ibadah / kegiatan religius	
C13	Kesejahteraan Karyawan ( <i>Employee Welfare</i> )	
C14	Karyawan difabel ( <i>Disability</i> )	
D.	Masyarakat ( <i>Society</i> )	11
D1	Sedekah/Donasi (Jumlah dan penyalurannya)	
D2	Wakaf (Jenis dan penyaluran)	
D3	Qard Hasan/pinjaman kebajikan (Jumlah dan penyaluran) ISR (2002)	
D4	Relawan ( <i>volunteer</i> )	
D5	Pemberian beasiswa sekolah ( <i>scholarships</i> )	
D6	Pemberdayaan kerja para lulusan sekolah/kuliah (magang atau praktik kerja lapangan)	
D7	Pengembangan generasi muda	
D8	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin	
D9	Kepedulian terhadap anak-anak	
D10	Kegiatan amal atau sosial (bantuan bencana alam, donor darah, sunatan massal, pembangunan infrastruktur, dll)	
D11	Menyokong kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan keagamaan) ISR (2002)	
E.	Lingkungan ( <i>Environment</i> )	5
E1	Konservasi lingkungan hidup	
E2	Kegiatan mengurangi efek pemanasan global (minimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan airbersih, dll)	
E3	Pendidikan terhadap lingkungan hidup	
E4	Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	
E5	Sistem manajemen lingkungan hidup	
	Jumlah	39

Tabel 3.2

### 3.4.1.2 Variabel Dependen (Variabel Terkait)

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel dependen adalah: “Sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering

disebut sebagai variabel terikat. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (Y). Definisi Profitabilitas menurut M. Hanafi dan Halim (2014:81) yaitu: “Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu *profit margin*, *return on asset (ROA)* dan *return on equity (ROE)*”.

Dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai proksi Profitabilitas. Menurut Dendawijaya (2009:118) “Return On Asset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan”.

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel profitabilitas adalah return on asset menurut (Dendawijaya, 2009:118) sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset}$$

### **3.4.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga dimaksud untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistika dapat

dilakukan secara benar. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah Pengungkapan ICG, Pengungkapan ICSR dan Profitabilitas dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pengungkapan ICG (X <sub>1</sub> )	Menurut IFSB (2016), pengungkapan ICG adalah pengungkapan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan pedoman syariah, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan dengan cara mengungkapkan beberapa item yang telah diatur dalam syariah governance.	<i>indeks ICG</i> = $\frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{\text{total jumlah item pengungkapan}}$	indeks
Pengungkapan ICSR (X <sub>2</sub> )	Menurut IFSB (2016), Pengungkapan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah pengungkapan tanggung jawab sosial islami perusahaan yang diujur menggunakan index ISR (Islamic Sosial Responsibility) terhadap	<i>indeks ICG</i> = $\frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{\text{total jumlah item pengungkapan}}$	indeks

	beberapa item yang telah ditentukan.		
Profitabilitas (Y)	<p>Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu <i>profit margin</i>, <i>return on asset (ROA)</i> dan <i>return on equity (ROE)</i>. (M. Hanafi dan Halim, 2014:81).</p> <p>Dalam penelitian ini <i>ROA</i> digunakan sebagai proksi Profitabilitas. <i>Return On Asset</i> digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. <i>Return On Asset</i> digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam</p>	$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset}$ <p>(Dendawijaya, 2009:118)</p>	rasio

	memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. (Dendawijaya, 2009:118)		
--	--	--	--

### 3.5 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah: "... wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."

Berdasarkan definisi di atas, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2019-2020. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 15 bank umum syariah.

Berikut adalah daftar bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2019-2020.

**Tabel 3.4**

#### **Populasi Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa**

No	Nama Bank
1	PT. Bank Syariah Indonesia
2	PT Bank Mega Syariah
3	PT Bank Aladin Syariah
4	PT Bank Victoria Syariah
5	PT Bank Jabar Banten Syariah
6	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

7	PT Bank Kb Bukopin Syariah
8	PT Bank BCA Syariah
9	PT BTPN Syariah
10	PT Bank Muamalat
11	PT BCA Syariah
12	PT Bank BRI syariah
13	PT Bank BNI Syariah
14	PT Bank Mandiri Syariah
15	PT Bank BTPN Syariah

Sumber: Daftar Bank Umum Syariah, Januari 2022

### 3.6 Sampel dan Teknik Sampling

#### 3.6.1 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81), Sampel adalah: "... bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar *representative* (mewakili)".

Sampel yang diambil harus *representative* (mewakili), yakni mewakili populasi yang berarti semua ciri-ciri atau karakteristik yang ada hendaknya tercermin dalam sampel.

#### 3.6.2 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:81) teknik sampling adalah: "... teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan."

Teknik sampling pada dasarnya terdiri dari *probability* sampling dan non *probability* sampling. Menurut Sugiyono (2017:82) *Probability* Sampling dapat didefinisikan sebagai berikut: “... teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel”.

Sedangkan *Non Probability* Sampling menurut Sugiyono (2017:84) adalah “... teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode non *probability* sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2017:85) *purposive sampling* adalah: “... teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.”

Alasan memilih *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih.

Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdaftar di OJK selama tahun periode 2019-2020.

2. Bank Umum Syariah yang melaporkan data yang dibutuhkan dengan lengkap selama periode 2019-2020.

**Tabel 3.5**

**Tahap Penyelesaian untuk Sampel Penelitian**

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Perusahaan
	Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	15
1	Dikurangi: Bank Umum Syariah yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdaftar di OJK selama tahun periode 2019-2020.	(1)
2	Dikurangi: Bank Umum Syariah yang tidak melaporkan data yang dibutuhkan dengan lengkap selama tahun periode 2019-2020.	(6)
	Jumlah Sampel Penelitian	8
	Periode Penelitian	1 Tahun
	Jumlah Sampel Penelitian	$8 \times 1 = 8$

Berdasarkan kriteria pada tabel 3.5 Di atas dihasilkan 8 bank umum syariah sebagai sampel penelitian. Berikut ini nama-nama bank umum syariah yang telah memenuhi kriteria dan terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan purposive sampling yang digunakan:

### **Daftar Bank Umum Syariah yang menjadi Sampel Penelitian**

**Tabel 3.6**

No	Nama Bank
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank BRI Syariah
3	PT. Bank BNI Syariah
4	PT. Bank Syariah Mandiri
5	PT. Bank BCA Syariah
6	PT. Bank Syariah Bukopin
7	PT. Bank BJB Syariah
8	PT. Bank Mega Syariah

Sumber: Daftar Perbankan Syariah OJK data diolah penulis

## **3.7 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **3.7.1 Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Menurut Sugiyono (2016:137) data sekunder adalah: “... sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.”

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2020. Data tersebut diperoleh dari masing-masing website resmi Bank Umum Syariah.

### **3.7.2 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017:137) teknik pengumpulan data adalah: “... cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian.”

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumenter

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen seperti data keuangan Bank Umum Syariah periode 2015-2020 dari website masing-masing bank.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengumpulkan, menelaah literatur-literatur berupa jurnal, buku, makalah, penelitian terdahulu ataupun sumber lainnya guna untuk

mendapatkan data teoritis yang akan dijadikan bahan referensi dalam pembahasan masalah yang diteliti.

### **3.8 Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2016:147) mengenai analisis data memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan”.

Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menarik kesimpulan. Dalam melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk mencapai suatu kesimpulan, penulis melakukan perhitungan, pengolahan dan penganalisaan dengan bantuan program *software IBM SPSS (Statistics Product and Service Solution)* sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan.

#### **3.8.1 Analisis Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2016:35) metode deskriptif adalah:

“... suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak

membuat perbandingan variabel itu pada sampel lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain”.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diamati. Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis dana pengungkapan *ICG* dan *ICSR* sebagai variabel independen dan profitabilitas sebagai variabel dependen. Diantara analisis deskriptif adalah rata-rata hitung.

Menurut Supranto (2008:95) rata-rata hitung adalah:

“... nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data. Nilai rata-rata mempunyai kecenderungan memusat, sehingga sering disebut ukuran kecenderungan memusat. Rata-rata hitung sering digunakan sebagai dasar perbandingan antara dua kelompok nilai atau lebih”.

Tahap-tahap ini dilakukan untuk menganalisis pengungkapan *ICG*, pengungkapan *ICSR* dan Profitabilitas. Dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Pengungkapan ICG**

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel distribusi di bawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah pengungkapan *ICG* yang dilakukan di perbankan syariah.
- b. Menghitung persentase pengungkapan *ICG* dengan cara membagi jumlah item yang diungkapkan dan total jumlah item pengungkapan

- c. Menunjukkan jumlah kriteria yang sangat rendah, rendah, cukup, baik, sangat baik. Pengukuran ICG dikembangkan dari standar tata kelola perusahaan lembaga keuangan berbasis syariah internasional yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB). Menurut *Islamic Financial Service Board (IFSB)*, ICG dalam penelitian ini mencakup dua kategori utama yaitu *shariah governance (SG)* dan *General Governance (GG)* dengan total indikator berjumlah 64. Berikut dapat dilihat table kriteria penilaian pengungkapan ICG pada tabel 3.7

**Tabel 3.7**

**Kriteria penilaian pengungkapan ICG**

Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Kriteria Penilaian
0	12	Sangat rendah
13	25	Rendah
26	38	Cukup
39	51	Baik
52	64	Sangat Baik

Sumber data: diolah penulis berdasarkan standar IFSB

- d. Menarik kesimpulan dengan membandingkan presentase pengungkapan ICG dengan kriteria penilaian.

## 2. Pengungkapan ICSR

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel distribusi di bawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah pengungkapan *ICSR* yang dilakukan di perbankan syariah.
- b. Menghitung persentase pengungkapan *ICSR* dengan cara membagi jumlah item yang diungkapkan dan total jumlah item pengungkapan
- c. Menunjukkan jumlah kriteria yang sangat rendah, rendah , cukup, baik, sangat baik. Menurut *Islamic Financial Service Board* (IFSB), *ISR* terdiri dari 5 tema utama yaitu pendanaan dan investasi (*finance and investment*), produk (*product*), karyawan (*employees*), masyarakat (*society*), dan lingkungan (*enviromtent*), dari lima tema *ISR* tersebut dikembangkan 39 sub item. Berikut dapat dilihat table kriteria penilaian pengungkapan *ICSR* pada tabel 3.8

**Tabel 3.8**  
**kriteria penilaian pengungkapan *ICSR***

Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Kriteria Penilaian
0	8	Sangat rendah
9	16	Rendah
17	24	Cukup
25	32	Baik
33	39	Sangat Baik

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan standar IFSB

- d. Menarik kesimpulan dengan membandingkan presentase pengungkapan ICG dengan kriteria penilaian.

### 3. Profitabilitas

- a. Menentukan laba sebelum pajak pada laporan keuangan perbankan syariah.
- b. Menentukan total aktiva pada laporan keuangan perbankan syariah.
- c. Menghitung persentase profitabilitas dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan total aktiva.
- d. Menunjuk jumlah kriteria yaitu 5 kriteria yang tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Dalam lampiran surat edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 2011 tujuan dari rasio keuangan ini adalah mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan angka *Return On Asset (ROA)* yang baik sebesar 1,5% Berikut dapat dilihat tabel kriteria penilaian *return on asset* pada tabel 3.9

**Tabel 3.9**  
**Kriteria Penilaian Profitabilitas**

Interval	Kriteria
$ROA > 1,5\%$	Sangat Baik
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Baik
$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Baik
$ROA \leq 0\%$	Tidak Baik

Sumber: SEBI No. 13/24/DPNP 2011

- e. Menarik kesimpulan dengan membandingkan presentase return on asset (ROA) dengan kriteria penilaian.

### **3.8.2 Analisis Asosiatif**

Analisis Asosiatif digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Menurut Sugiyono (2016:36) analisis asosiatif adalah: “Suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”. Dalam penelitian ini analisis asosiatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengungkapan *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Corporate Social Responsibility* dan profitabilitas.

#### **3.8.2.1 Uji Asumsi Klasik**

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas.

##### **a. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2018:161) uji asumsi klasik adalah:

“... uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan.”

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel independen dan variabel dependen pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah sampel yang digunakan mempunyai berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Uji normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Test Normality Kolmogrov-Smirnov*, menurut Singgih Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas yaitu:

1. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah normal.
2. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. (Ghozali, 2018:107).

Menurut Ghozali (2018:107) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. “Jika nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari:
  - a. *tolerance value*
  - b. *variance inflation factor (VIF)*.”

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai *VIF* tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ).

Dasar pengambilan keputusan dengan *tolerance value* atau *variance inflation factor (VIF)* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *VIF*  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan nilai *VIF*  $> 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Menurut Singgih Santoso (2012:236) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{Tolerance} \text{ atau } Tolerance = \frac{1}{VIF}$$

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut disebut heteroskedastisitas, persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah distudentized). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2018:137-138).

#### d. Uji Autokorelasi

Menurut Winarno (2015:29) autokorelasi adalah: “Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu dengan residual observasi lainnya”. Salah satu asumsi dalam penggunaan model OLS (*Ordinary Least Square*) adalah tidak ada autokorelasi yang dinyatakan  $E(e_i, e_j) = 0$  dan  $i \neq j$  sedangkan apabila ada autokorelasi maka dilambangkan  $E(e_i, e_j) \neq 0$  dan  $i \neq j$ .

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. (Ghozali, 2018:111)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Uji Durbin-Watson untuk menguji autokorelasi. Uji Durbin-Watson adalah salah satu uji yang banyak digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi (baik negatif maupun positif).

**Tabel 3.10**  
***Uji Durbin-Watson***

Nilai Statistik d	Hasil
Dw di bawah -2	Terjadi autokorelasi positif
Dw di antara -2 dan +2	Tidak terjadi autokorelasi
Dw di atas +2	Terjadi autokorelasi negatif

Sumber: Winarno (2015:531)

### 3.8.2.2 Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Sugiyono (2016: 63), menyatakan hipotesis sebagai berikut:

“... hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen (variabel bebas) kepada variabel dependen (variabel terikat). Dengan pengujian hipotesis ini penulis menetapkan dengan menggunakan uji signifikan dengan penetapan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ).

Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan secara parsial menggunakan uji t.

Adapun rancangan-rancangan pengujian hipotesis secara parsial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Merumuskan Hipotesis

**Tabel 3.11 Rumusan Hipotesis**

$H_0$ ( $\beta_1 = 0$ )	Pengungkapan ICG berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas
-------------------------	---

H <sub>a1</sub> (β <sub>1</sub> = 0)	Pengungkapan ICSR berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas
--------------------------------------	--

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Menurut Sugiyono (2016:187) rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t: Nilai uji t

r: Nilai Koefisien Korelasi

r<sup>2</sup>: Nilai Koefisien Determinasi

n:Jumlah Data

## 2. Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpa 5% (0,05). Signifikansi 5% artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%.

## 3. Pengambilan keputusan

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , atau jika  $t_{hitung} < -t_{tabel}$  maka H<sub>0</sub> ditolak (signifikan)
2. Jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka H<sub>0</sub> diterima (tidak signifikan)

Apabila  $H_0$  diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan dan sebaliknya apabila  $H_0$  ditolak, maka hal ini diartikan bahwa variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.

### 3.8.2.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu dana pengungkapan *Islamic corporate governance* (X1) dan pengungkapan *Islamic corporate sosial responsibility* (X2) terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas (Y).

Menurut Sugiyono (2016:188) “Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen”. Persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan (profitabilitas)

a = Konstanta atau bila harga  $X = 0$  b = Koefisien Regresi

X = Nilai variabel independen

### 3.8.2.4 Analisis Koefisien Korelasi (R)

Menurut Ghozali (2018:95) analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel dan ukuran yang dipakai untuk menentukan derajat atau kekuatan hubungan korelasi tersebut. Pengukuran koefisien ini dilakukan dengan menggunakan koefisien Pearson Product Moment (r). Menurut Sugiyono (2017:183), teknik korelasi adalah "... teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau ratio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama". Rumus korelasi Perason Product Moment (r) adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

x = Variabel Independen

y = Variabel Dependen

n = Banyaknya Sampel

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui tingkat pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Pada hakikatnya nilai  $r$  dapat bervariasi dari (-1)hingga +1 atau secara matematis dapat ditulis menjadi  $-1 \leq r \leq +1$ . Hasil dari perhitungan akan memberikan tiga alternatif, yaitu:

1. Bila  $r = 0$  atau mendekati 0, maka korelasi antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila  $r = +1$  atau mendekati +1, maka korelasi antara kedua variabel adalah kuat dan searah, dikatakan positif.
3. Bila  $r = -1$  atau mendekati -1, maka korelasi antara kedua variabel adalah kuat dan berlawanan arah, dikatakan negatif.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil dapat dilihat pada tabel 3. 11

### Kategori Koefisien korelasi

**Tabel 3.12**

<b>Interval Korelasi</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2016:184)

#### 3.8.2.5 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis determinasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Menurut Imam Ghozali (2013:341) menyatakan bahwa:

“Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. *Coc & R Square* merupakan ukuran yang mencoba meniru  $R^2$  pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan”.

Koefisien determinasi (Kd) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (Kd) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan koefisien determinasi (Kd) menurut Sugiyono (2016:257) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

$r^2$  = Koefisien kuadrat korelasi ganda

analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu pengungkapan ICG dan pengungkapan ICSR terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas dinyatakan dalam persentase. Proses pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

### 3.9 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, model penelitian merupakan abstrak dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, risiko pembiayaan dan profitabilitas terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, penulis memberikan model penelitian dinyatakan dalam gambar ..

#### Model Penelitian

